

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORITIK

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Beberapa karya tulis tersebut diantaranya yaitu:

1. Noor Fursana Halim (2015)

Penelitian skripsinya yang berjudul "*Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta*". Menyimpulkan bahwa variabel karakter nasabah/anggota berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di BMT BIF cabang Bugisan Yogyakarta. Karena anggota dapat mengatur dan mengendalikan dana pinjaman dengan baik, dana pembiayaan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif, anggota mempertimbangkan dahulu sebelum melakukan peminjaman dan anggota merasa tanggungjawab atas angsuran yang dibayar. Variabel jaminan berpengaruh negatif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta. Karena jaminan yang dijadikan agunan memenuhi syarat untuk pencairan dana guna menutup kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah, jumlah dana pembiayaan lebih kecil daripada nilai jaminan, alasan jaminanlah yang akan mendorong anggota untuk memenuhi janjinya dan jenis jaminan

yang digunakan adalah berupa barang yang sulit untuk dijual atau dipindahtangankan.

Variabel musibah ekonomi/bencana alam berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan bermasalah di BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta. Karena anggota mendapatkan musibah bencana alam yang tidak terduga, anggota mendapatkan musibah penipuan/pencurian, anggota mendapatkan musibah kecelakaan dan kebijakan pemerintah seperti naiknya harga BBM dan harga sembako menyebabkan sulitnya membayar angsuran pembiayaan.

2. Ahmad Tabrizi (2014)

Dalam skripsinya yang berjudul "*Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia*" variabel yang digunakan adalah PDB/GDP, inflasi, dan KURS. Data yang diteliti yaitu data Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2005-2013. Dalam penelitiannya, disimpulkan bahwa variabel bebas yang diteliti yaitu PDB/GDP, inflasi, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai NPF pada BUS periode 2005-2013. Kemudian untuk secara parsial atau individu, memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan nilai NPF pada BUS periode 2005-2013 dengan nilai probabilitas yang berbeda-beda. Dari hasil analisis ini diketahui bahwa semua variabel independen terdapat hubungan yang positif dengan variabel dependennya yaitu antara PDB dengan nilai NPF BUS, inflasi dengan NPF dan KURS dengan NPF.

3. Mutaminah dan Siti Nur Zaidah Chasanah (2012)

Penelitian yang dilakukan berjudul “Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan *Non Performing Financing* Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Jenis metode penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian eksplanatory. Penelitian eksplanatory adalah penelitian yang menjelaskan hubungan klausal antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis dan penjelasan lebih dipokokkan pada sifat analisisnya. Dalam penelitian ini akan diuji apakah ada pengaruh antar *Gross Domestic Product riil*, inflasi, nilai tukar, Rasio *return* pembiayaan *profit loss sharing* terhadap *return* total pembiayaan (RR), Rasio alokasi pembiayaan *murabahah* terhadap alokasi pembiayaan *profit loss sharing* (RF) terhadap rasio *Non Performing Financing* pada bank syariah di Indonesia. Dari hasil penelitian yang dilakukan, berkesimpulan bahwa inflasi dan Rasio *Financing* terbukti memberikan kontribusi terhadap perubahan NPF bank umum syariah, sedangkan GDP, Kurs dan Rasio *Return* tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan atau penurunan NPF di bank umum syariah.

4. Sri Haryati (2009)

Di judulnya “*Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makroekonomi*”. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekse likuiditas, pertumbuhan DPK, pertumbuhan pinjaman/simpanan diterima, pertumbuhan ekuitas, BI Rate, inflasi dan nilai tukar. Data yang digunakan sejak pada tahun 2005 hingga 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji

statistik F, uji statistik t dan uji *chow test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara bersama-sama variabel yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kredit, baik pada perbankan nasional maupun bank asing campuran. Pada perbankan nasional variabel pertumbuhan DPK dan pertumbuhan pinjaman diterima mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit sedangkan pertumbuhan eksekutif likuiditas mempunyai pengaruh negatif signifikan. Sedangkan BI Rate, inflasi dan nilai tukar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Pada bank asing-campuran variabel pertumbuhan DPK, pertumbuhan pinjaman diterima dan pertumbuhan eksekutif likuiditas mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Sedangkan BI Rate, inflasi dan nilai tukar mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

5. Hermawan Soebagio (2005)

Penelitian yang berjudul “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non-Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Konvensional*”, dengan variabel dependen Non-Performing Loan dan variabel independen nilai Kurs, Tingkat Inflasi, GDP, CAR, KAP, Tingkat Suku Bunga Kredit dan LDR. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis regresi berganda. Dalam penelitian ini, beliau menyimpulkan bahwa Tingkat Suku Bunga Kredit, Inflasi KAP, dan Nilai Kurs berpengaruh positif signifikan terhadap *Non-Performing Loan*, GDP berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap *Non-*

Performing Loan dan CAR serta LDR mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *Non-Performing Loan*.

Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Ahmad Tabrizi (2014). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Tabrizi adalah pada variabel independen, periode penelitian, objek penelitian, dan metode penelitian. Variabel independen pada penelitian ini adalah inflasi, Upah Minimum Regional/Upah Minimum Provinsi (UMR/UMP), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan *Gross Domestic Product (GDP)*/Produk Domestik Regional Bruto. Periode yang diteliti pada penelitian ini menggunakan periode Januari 2010-Juni 2015 (data bulanan). Metode penelitian yang digunakan adalah *Vector Autoregression (VAR)*. Namun untuk objek penelitian ini sama dengan objek penelitian Ahmad Tabrizi, yaitu Bank Umum Syariah, hanya saja penelitian ini mencakup 6 provinsi di pulau Jawa saja, yaitu provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bank Umum Syariah dipilih karena dirasa keberadaan lembaga keuangan bank ini berada diantara masyarakat menengah keatas maupun masyarakat menengah kebawah. Jenis penelitian kuantitatif pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian komparatif. Karena diharapkan dengan menggunakan jenis penelitian ini, kita bisa melihat faktor geografis ekonomi (eksternal) apa saja yang dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah (NPF) di 6

provinsi pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Noor Fursana Halim, <i>Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembiayaan Bermasalah Pada BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta</i>	Perbankan syariah lebih stabil dalam sistem kerja dan produk yang ditawarkan dibandingkan bank konvensional. Jumlah pembiayaan dan GDP berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF, nilai tukar berpengaruh negatif namun tidak signifikan, sedangkan inflasi, SBI dan SWBI tidak berpengaruh pada bank syariah. Sementara NPL sangat tergantung pada inflasi yang terjadi (positif) dan besarnya LDR (negatif). Hubungan NPL dan LDR yang negatif menunjukkan tidak berfungsinya aspek intermediary bank konvensional terhadap dunia usaha memparah <i>decoupling</i> sektor riil dan moneter. Temuan lain menunjukkan bahwa besaran NPL bank konvensional terpengaruh oleh krisis keuangan global, sedangkan bank syariah cenderung lebih <i>resisten</i>	1. Objek Penelitian: BMT BIF Cabang Bugisan Yogyakarta. 2. Periode Waktu: 2003-2010 3. Alat analisis: VAR dan regresi berganda

2	Ahmad Tabrizi, <i>Analisis Pengaruh Variabel Makro Terhadap Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia</i>	Variabel bebas yang diteliti yaitu PDB/GDP, inflasi, dan nilai tukar secara simultan berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai NPF pada BUS periode 2005-2013. Kemudian untuk secara parsial atau individu, memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan nilai NPF pada BUS periode 2005-2013 dengan nilai probabilitas yang berbeda-beda. Dari hasil analisis ini diketahui bahwa semua variabel independen terdapat hubungan yang positif dengan variabel dependennya yaitu antara PDB dengan nilai NPF BUS, inflasi dengan NPF dan KURS dengan NPF.	<p>1. Objek Penelitian: Bank umum syariah di Indonesia</p> <p>2. Variabel: tidak terdapat indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi.</p> <p>3. Waktu: 2005-2013</p> <p>4. Alat analisis: model regresi linear.</p>
3	Mutaminah dan Siti Nur Zaidah Chasanah, <i>“Analisis Eksternal Dan Internal Dalam Menentukan Non</i>	Rasio Financing dan Inflasi secara umum terbukti memberikan kontribusi terhadap perubahan NPF bank umum syariah. Akan	1. Objek Penelitian: Bank Syariah di Indonesia

<i>Performing Financing Bank Umum Syariah Di Indonesia</i>	tetapi GDP, Kurs, dan Rasio Return tidak berpengaruh terhadap NPF bank umum syariah baik peningkatan maupun penurunan.	2. Variabel: tidak terdapat IPM, dan UMR/UMP 3. Periode waktu: 2005-2011 4. Alat analisis: regresi linear berganda
4 Sri Haryati, <i>Pertumbuhan Kredit Perbankan di Indonesia: Intermediasi dan Pengaruh Variabel Makroekonomi</i>	Secara bersama-sama variabel yang digunakan berpengaruh dan signifikan terhadap pertumbuhan kredit baik pada perbankan nasional maupun bank asing-campuran. Pada perbankan nasional variabel pertumbuhan DPK dan pertumbuhan pinjaman diterima mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit sedangkan pertumbuhan ekse likuiditas mempunyai pengaruh negatif signifikan. Sedangkan BI Rate, inflasi dan nilai tukar mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Pada bank asing-campuran variabel pertumbuhan DPK, pertumbuhan pinjaman diterima dan pertumbuhan ekse likuiditas	1. Objek Penelitian: Perbankan nasional dan perbankan asing-campuran 2. Periode waktu: 2005-2008 3. Alat analisis: Uji F, Uji T dan Uji Chow test. 4. Variabel: tidak terdapat produk domestik regional bruto (PDRB), IPM, dan UMR/UMP.

mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan kredit. Sedangkan BI Rate, inflasi dan nilai tukar mempunyai pengaruh yang tidak signifikan.

5	Hermawan Soebagio, <i>Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Non-Performing Loan (NPL) pada Bank Umum Konvensional</i>	Nilai Kurs, Inflasi KAP, Tingkat Suku Bunga Kredit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Non-Performing Loan</i> , GDP berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>Non-Performing Loan</i> dan CAR serta LDR mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap terjadinya <i>Non-Performing Loan</i> .	1. Objek Penelitian: Bank umum konvensional 2. Variabel: Tidak terdapat, IPM, dan UMR/UMP. 3. Periode waktu: 2004-2005 4. Alat analisis: Regresi Berganda
----------	---	---	--

B. Kerangka Teoritik

1. Makro Ekonomi

Perekonomian saat ini tidak terlepas dari keadaan ekonomi makro yang setiap saatnya selalu bergerak fluktuatif. Kegiatan usaha sangat berpengaruh terhadap keadaan ekonomi makro. Makro ekonomi adalah

Pengaruh dari variabel ekonomi makro memiliki ciri-ciri yang berbeda terhadap pertumbuhan perekonomian. Perbedaan inilah yang harus dihadapi oleh lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Variabel ekonomi makro yang digunakan dalam penelitian ini adalah inflasi, indeks pembangunan manusia, upah minimum regional/upah minimum provinsi, dan produk domestik bruto. Pemilihan keempat variabel tersebut dikarenakan merupakan indikator perekonomian yang dapat berpengaruh pada penyaluran pembiayaan.

a. Inflasi

Inflasi yaitu kecenderungan dari harga-harga untuk meningkat secara umum dan terus menerus¹. Kenaikan harga dari satu atau dua komoditas dan ketika terjadi kenaikan harga sementara belum bisa dikatakan sebagai inflasi karena hanya berpengaruh terhadap beberapa komoditas dan dalam jangka waktu yang singkat. Dikatakan inflasi ketika harga sebagian besar barang atau komoditas cenderung meningkat dan dalam jangka waktu relatif panjang yang

¹ Boediono, *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 1985, hal. 155.

dapat menyebabkan terganggunya kestabilan perekonomian suatu negara atau wilayah.

Dalam Ekonom Islam, Taqiuddin Ahmad ibn al-Marqizi, yang merupakan salah satu murid Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan:²

1) *Natural Inflation*

Inflasi ini merupakan inflasi yang diakibatkan murni dari keadaan pasar, dimana orang tidak mempunyai kendali atas inflasi tersebut. Dengan kata lain, inflasi jenis ini murni karena turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat.

2) *Human Error Inflation*

Golongan inflasi ini diakibatkan oleh kesalahan dari manusia itu sendiri, seperti: percetakan uang yang berlebihan dengan niat untuk mencari keuntungan, pajak yang berlebihan, dan administrasi yang buruk.

Sesuai dengan firman Allah:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٤١

Artinya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

² Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam*, Jakarta: PT RAJAGRAFINDO. 2014, hal. 140

Selain dibagi menjadi dua golongan, inflasi berdasarkan sebabnya dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:³

1) *Demand pull inflation*

Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat terhadap barang. Biasanya kenaikan harga barang produksi mendahului kenaikan harga bahan produksi. Jadi harga akan selalu naik selama permintaan masih ada.

2) *Cosh-push inflation*

Inflasi ini dikarenakan naiknya biaya produksi. Biasanya ditandai oleh naiknya harga dan turunnya produksi. Kenaikan biaya produksi akan menimbulkan penurunan produksi dan kenaikan harga barang.

Adapun klasifikasi tingkat persentase inflasi dapat digolongkan sebagai berikut⁴:

- a) Inflasi lunak atau inflasi ringan, yaitu dibawah 10% per tahun (*single digit*).
- b) Inflasi sedang/moderat, yaitu antara 10% sampai 30% per tahun.
- c) Inflasi berat antara 30% sampai 100% per tahun.
- d) Hiper inflasi (*hyper inflation*), yaitu diatas 100% per tahun.

³ Nopirin. *Ekonomi Moneter Buku 2*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA. 1987, hal. 27-28

⁴ Rachmad dan Maya, *Pengantar Teori Moneter serta aplikasinya pada Sistem ekonomi Konvensional & Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011, hal. 119.

Penentuan parah atau tidaknya besaran inflasi tergantung dari kondisi perekonomian negara itu sendiri. Jika besar inflasi yang terjadi di suatu negara adalah 25% (inflasi sedang) namun keadaan di negara tersebut mayoritas penduduknya terdiri dari golongan yang berpenghasilan rendah. Besar inflasi tersebut bukan lagi masuk ke dalam inflasi sedang, melainkan sudah masuk kepada inflasi berat karena kondisi perekonomian negara itu belum stabil/makmur.

b. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu ukur untuk menilai kualitas SDM di suatu negara adalah dengan menggunakan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah suatu konsep yang diperkenalkan pertama kali oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990, dimana konsep ini mencoba menggabungkan antara indeks harapan hidup, indeks pendidikan, dan indeks daya beli.

Adapun formula yang digunakan dalam menyusun IPM ini adalah sebagai berikut:⁵

$$\text{IPM} = \frac{1}{3} (\text{indeks harapan hidup}) + \frac{1}{3} (\text{indeks pendidikan}) + \frac{1}{3} (\text{indeks daya beli})$$

Angka harapan hidup adalah perkiraan tingkat usia rata-rata yang akan dicapai oleh penduduk dalam periode waktu tertentu.

⁵ Beik, Irfan Syauqi Beik dan Arsyianti, Laily Dwi, "Ekonomi Pembangunan Syariah", Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016, hal. 147-148

Semakin baik kondisi perekonomian dan pelayanan kesehatan di suatu negara maka akan semakin tinggi pula angka harapan hidup masyarakat di negara tersebut.

Indeks pendidikan menggabungkan dua indikator utama, yaitu rata-rata lama bersekolah dan tingkat melek huruf. Semakin tinggi nilai kedua indikator ini maka akan semakin baik pula nilai indeks pendidikannya. Sedangkan indeks daya beli merujuk pada standar hidup layak di suatu wilayah. Indeks ini menunjukkan berapa sesungguhnya tingkat kemampuan seseorang atau suatu keluarga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga mereka mampu menjalankan kehidupan secara layak.

Skor IPM ini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati angka 1 semakin tinggi nilai IPM-nya dan semakin berkualitas SDM yang dimiliki oleh suatu negara. Demikian pula sebaliknya. IPM ini oleh UNDP dikelompokkan menjadi 4(empat) kategori, yaitu:⁶

- 1) *Very high HDI* : untuk nilai IPM ≥ 0.800
- 2) *High HDI* : $0.700 \leq$ nilai IPM < 0.800
- 3) *Medium HDI* : $0.550 \leq$ nilai IPM < 0.700
- 4) *Low HDI* : nilai IPM < 0.550

Meskipun konsep IPM ini belum menggambarkan kondisi SDM yang ideal, apalagi aspek spiritualitas tidak dimasukkan dalam perhitungannya, namun konsep inilah yang saat ini tersedia dan

⁶ Ibid, hal. 147-148

disepakati untuk digunakan sebagai perbandingan level pembangunan SDM antarnegara di dunia. Juga dapat dilihat bagaimana tren pembangunan SDM di berbagai negara di seluruh dunia.⁷

c. Upah Minimum Provinsi

Menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan dari pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Oleh karena itu Upah Minimum Provinsi (UMP) atau yang dulu biasa dikenal dengan Upah Minimum Regional (UMR) ialah suatu standar minimum yang digunakan oleh pengusaha-pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya.

Penetapan upah dilakukan pada setiap tahun melalui beberapa proses dan koordinasi. Awalnya Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh, dan pengusaha mengadakan rapat, lalu membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan

⁷ Ibid, hal. 147-148

oleh buruh, karyawan, dan pegawai. Setelah dilakukan survei di beberapa jumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan KHL, Dewan Pengupahan Daerah DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Terdapat 3 komponen dalam upah yaitu Gaji Pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Penjelasan ketiganya adalah sebagai berikut:

- 1) **Gaji pokok** ialah imbalan dasar yang dibayarkan kepada pekerja atau buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besar upahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 2) **Tunjangan Tetap** merupakan pembayaran kepada pekerja atau buruh yang dilakukan secara teratur (setiap bulan) dan tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja atau pencapaian prestasi kerja tertentu. Tunjangan tetap dibayar dalam satuan waktu yang sama dengan pembayaran upah pokok, seperti tunjangan anak, tunjangan istri, dan tunjangan lainnya.

Tunjangan tidak tetap yaitu pembayaran yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan pekerja yang diberikan secara tidak tetap dan dibayarkan menurut satuan yang tidak sama dengan waktu pembayaran upah pokok, seperti tunjangan makan atau tunjangan transport yang didasarkan pada tingkat kehadiran pekerja.

d. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ialah salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menggambarkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Berbeda dengan PDRB harga berlaku, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Selain sebagai indikator keadaan ekonomi suatu wilayah atau daerah, PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks

implisit). Indeks harga implisit ialah rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan.

Cara perhitungan Produk Domestik Regional Bruto secara konseptual menggunakan tiga jenis pendekatan, yaitu: pendekatan pengeluaran, pendekatan produksi, dan menggunakan pendekatan pendapatan.

1) Pendekatan Pengeluaran

Produk Domestik Regional Bruto yaitu semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: konsumsi pemerintah, pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, perubahan inventori, pembentukan modal tetap domestik bruto, dan ekspor neto (merupakan ekspor dikurangi impor).

2) Pendekatan Produksi

Produk Domestik Regional Bruto ialah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah atau wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya kurun waktu satu tahun). Unit-unit produksi dalam penyajian ini dikelompokkan dalam 9 lapangan usaha (sektor), yaitu:

- a) industri pengolahan
- b) pertambangan dan penggalian
- c) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan
- d) listrik, gas dan air bersih

- e) konstruksi,
 - f) pengangkutan dan komunikasi
 - g) perdagangan, hotel dan restoran
 - h) keuangan, real estate dan jasa perusahaan
 - i) jasa-jasa (termasuk jasa pemerintah)
- 3) Pendekatan Pendapatan

Produk Domestik Regional Bruto yaitu jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya kurun waktu satu tahun). Balas jasa yang dimaksudkan ialah sewa tanah, upah dan gaji, bunga modal dan keuntungan, semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak-pajak langsung lainnya. Dalam pengertian ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak secara tidak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

Pada dasarnya PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit berbagai usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

2. Konsep Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang-piutang, juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang-piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman kepada pihak lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya kepada orang lain, maka ia dapat disebut telah memberikan utang kepadanya. Adapun istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh berbeda dalam pemaknaannya di masyarakat.

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk kepada masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengolahan barang (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan.⁸ Pembiayaan atau *financing* ialah pendanaan yang

⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 17.

diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁹

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁰

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I believe, I Trust*, saya percaya, saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang berarti (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *sahib al-mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.¹¹

⁹ *Ibid*

¹⁰ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

¹¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

b. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.¹² Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:

- 1) Peningkatan ekonomi umat, artinya: masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
- 2) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
- 3) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- 4) Membuka lapangan kerja baru artinya: dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- 5) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

¹² Muhammad, *Manajemen Pembiayaan*, h.17

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan:

- 1) *Profitability* yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- 2) *Safety* yakni keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *Profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.¹³

c. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank syariah secara umum berfungsi untuk:

- 1) Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

¹³ Rivai, dan Veithsal, *Islamic Financial Management, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa* (Jakarta: Rajawali Press, 2008) hal. 6

Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat.

2) Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

3) Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.

Dalam penjelasan diatas peran pembiayaan sangat penting karena dengan pembiayaan, maka pihak defisit (pihak yang membutuhkan dana) akan termudahkan ketika membutuhkan dana. Namun, ketika

sebuah bank syariah memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, bank tidak boleh serta merta langsung memberikan secara Cuma-Cuma dana tersebut kepada nasabah, tetapi perlu ketelitian dan kepercayaan yang tinggi bagi bank kepada nasabahnya agar dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan itu, resiko dari pembiayaan atau pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing*) dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pihak bank.

3. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah merupakan suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran. Sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).

Pembiayaan bermasalah adalah salah satu dari resiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa resiko pembiayaan merupakan resiko yang disebabkan oleh adanya *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, resiko pembiayaan mencakup resiko terkait produk dan resiko terkait dengan pembiayaan korporasi.¹⁴

¹⁴ Ir. Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010) hal. 260

Pembiayaan yang bermasalah yang dialami oleh pihak bank (Debitur) kepada para nasabah (kreditur) itu terjadi karena dipengaruhi oleh kualitas karakter nasabah, jumlah jaminan, serta rasio utang terhadap equity (kekayaan). Secara teori menjelaskan bahwa, apabila karakter kualitas nasabah itu baik, maka kemungkinan untuk penyelesaian pembiayaan akan baik pula, dan tingkat pembiayaan bermasalah dari nasabah itu akan turun. Sebaliknya apabila karakter kualitas nasabah itu buruk, maka tingkat pembiayaan bermasalah oleh nasabah itu akan tinggi, akan tetapi, dalam kenyataannya faktor dari pihak bank juga mampu mempengaruhi naik turunnya tingkat pembiayaan bermasalah, karena apabila pihak bank tidak sepenuhnya menjalankan prosedur dari pemberian pinjaman, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah dari pembiayaan itu akan muncul, tetapi apabila pihak bank mampu menjalankan prosedur dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah, maka kemungkinan dari pembiayaan bermasalah itu akan sedikit. Selain itu, tingkat jaminan (*guarantees*) juga berpengaruh terhadap tingkat pembiayaan bermasalah karena secara teori peranan penjaminan eksternal sebesar 100 persen (dengan asumsi penjaminan tersebut kredibel) adalah menjadikan kreditur memberikan kredit tanpa resiko, sehingga apabila tingkat jaminan mempengaruhi dari pembiayaan bermasalah. Kemudian tingkat rasio perbandingan antara kekayaan (*equity*) dengan utang juga mempengaruhi dari pembiayaan bermasalah itu, tingkat utang yang

tinggi itu memungkinkan terjadinya kebangkrutan sehingga peluang pembiayaan bermasalah akan tinggi, begitupun juga sebaliknya. Di sisi lain, kebangkrutan yang dialami oleh penerima pembiayaan bisa terjadi karena kualitas nasabah yang buruk dalam mengelola dananya, akan tetapi situasi ekonomi nasional dan global, situasi politik, serta situasi alam berpengaruh juga terhadap kemampuan kualitas nasabah dan juga berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah.

Permasalahan dalam pembiayaan dapat pula terjadi karena ketidaklancaran nasabah dalam membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau *profit margin*. Ketidaklancaran tersebut menyebabkan adanya kolektibilitas atau pengelompokan pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan. Sebagai contoh untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:

a. Lancar

Suatu pembiayaan akan dikatakan lancar atau termasuk dalam kategori kolektibilitas 1 apabila :¹⁵

- 1) Tidak adanya tunggakan angsuran pokok, tunggakan bagi hasil/*profit margin*, atau cerukan karena penarikan

¹⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, 2005, hal.165.

- 2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi:
 - a) Belum melebihi 1 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
 - b) Belum melebihi 3 bulan, bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan.
 - c) Belum melebihi 6 bulan, bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 4 bulanan atau lebih.
- 3) Terdapat tunggakan bagi hasil/*profit margin*, tetapi:
 - a) Belum melebihi 1 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya kurang dari 1 bulan.
 - b) Belum melebihi 3 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan.
- 4) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melebihi 15 hari kerja.

b. Kurang lancar

Pembiayaan dikatakan kurang lancar apabila:¹⁶

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok, yang:
 - a) Melebihi 1 bulan dan belum melebihi 6 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan.
 - b) Melebihi 3 bulan dan belum melebihi 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan, atau tiga bulanan.

¹⁶ Ibid, hlm. 166.

- c) Melebihi 6 bulan tetapi belum melebihi 12 bulan bagi pembiayaan yang ditetapkan masa angsurannya 6 bulanan atau lebih.
- 2) Terdapat tunggakan bagi hasil/*profit margin*, tetapi:
 - a) Melebihi 1 bulan, tetapi belum melebihi 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang dari 1 bulan
 - b) Melebihi 3 bulan, tetapi belum melebihi 6 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran lebih dari 1 bulan
 - 3) Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melebihi 15 hari kerja.
- c. Diragukan

Pembiayaan dikatakan diragukan apabila pembiayaan tersebut tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar, tetapi penilaian dapat disimpulkan bahwa:¹⁷

- 1) Pembiayaan masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-kurangnya 75 persen dari hutang peminjam termasuk bagi hasil atau *profit margin*.
- 2) Pembiayaan tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang-kurangnya 100 persen dari hutang peminjam.

¹⁷ Ibid, hlm. 167.

d. Macet

Pembiayaan dikategorikan macet, apabila:¹⁸

- 1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, maupun diragukan
- 2) Memenuhi kriteria diragukan tetapi jangka waktu 21 bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha penyelamatan.
- 3) Pembiayaan tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Pitalang Negara (BUPN) atau telah diajukan penggantian rugi kepada perusahaan asuransi kredit di Badan Arbitrase Syariah.

4. Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Dalam penjelasan pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan maupun dalam Penjelasan Pasal 37 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah antara lain dinyatakan bahwa kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat.¹⁹

¹⁸ Ibid

¹⁹ Djamil, Faturrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.72

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain:

- a. Uang / kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- b. Margin / Bagi hasil / *fee* tidak dibayar;
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan
- d. Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financing / NPF*) yang disebabkan oleh faktor intern maupun extern bank.

Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor intern dan faktor-faktor ekstern. *Faktor intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor ekstern* adalah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.

Untuk menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab

terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan telah dilakukan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain diluar proyek pembiayaan yang disepakati.²⁰

Dalam menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan bank, bank konvensional biasanya menggunakan rasio *Non Performing Loan* atau NPL. Menurut surat edaran BI No. 3/30DPNP tanggal 14 Desember 2001, NPL diukur dari rasio perbandingan antara kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan

²⁰ Ibid, hal. 73-74

kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit kepada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPL yang baik adalah dibawah 5 persen.

Risiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu risiko usaha bank, yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan oleh bank, mengingat fungsi pembiayaan sebagai penyumbang pendapatan terbesar bagi bank syariah. Tingkat kesehatan pembiayaan (NPF) ikut mempengaruhi pencapaian laba bank.

Kualitas aktiva produktif pada bank syariah diukur dengan *Non Performing Financing/ NPF*. NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Aktiva produktif bank syariah diukur dengan perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Adapun NPF dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah (KL,D,M)}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

5. Bank Syariah

a. Pengertian

Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Bank ini tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Alqur'an dan Hadis.²¹

Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam maksudnya adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam. Dalam tata cara bermuamalah itu di jauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan atau praktik-praktik usaha yang dilakukan di zaman Rasulullah atau bentuk-bentuk usaha yang telah ada sebelumnya, tetapi tidak dilarang oleh beliau.

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, mendefinisikan bank sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat, dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.10 Tahun

²¹ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?*, cet. 1 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hal. 33

1998, tentang Perbankan, terdapat dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kedua jenis bank tersebut dalam menjalankan kegiatan usahanya diklasifikasikan menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank dengan prinsip syariah.²²

Adapun fungsi dari bank syariah antara lain sebagai berikut:²³

1) Manajer Investasi

Salah satu fungsi bank yang penting adalah sebagai manajer investasi, maksudnya adalah bank syariah merupakan manajer investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank syariah diharapkan mendapatkan hasil yang mempunyai implikasi langsung kepada pemilik dana. Jika investasi yang dilakukan bank syariah mengalami pembayaran yang tidak lancar, bahkan sampai macet, bisa mengakibatkan pendapatan yang diperoleh kecil dan pendapatan pemilik dana menjadi kecil pula.

2) Investor

Bank syariah menginvestasikan dana dengan jenis dan pola investasi yang sesuai dengan syariah. Investasi tersebut meliputi

²² Ibid, hal. 34

²³ Ibid, hal. 37

akad *Murabahah*, Sewa-menyewa, *Musyarakah*, akad *Mudharabah*, akad *Salam*, memperdagangkan produk dan investasi atau memperdagangkan saham yang dapat diperjual belikan, keuntungan dibagikan setelah bank menerima bagian keuntungan yang sudah disepakati sebelum pelaksanaan akad.

3) Jasa Keuangan

Bank syariah menjalankan fungsi sebagai pemberi jasa keuangan, misalnya memberi jasa *kliring*, *transfer*, inkaso, pembayaran gaji, jasa untuk memperoleh imbalan atas dasar sewa, dan sebagainya. Hanya saja yang sangat diperhatikan adalah prinsip syariah tidak boleh dilanggar.

4) Fungsi Sosial

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *Qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Disamping itu konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting didalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

b. Tujuan

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain

bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:²⁴

- 1) Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tersipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya.
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap menghindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- 3) Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

²⁴ Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo, *Mengapa Memilih Bank Syariah?* Cet. Satu (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005) hal. 36-37

- 4) Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat beroperasi tumbuh, dan berkembang melebihi bank-bank dengan metode lain.²⁵

C. Hipotesis

1. Pengaruh Inflasi terhadap *Non Performing Financing*

Inflasi merupakan proses kenaikan harga umum barang-barang secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja (meskipun dengan persentase yang cukup besar) bukanlah merupakan inflasi²⁶. Kenaikan harga dari barang-barang ini diakibatkan oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak dibandingkan jumlah barang atau jasa yang tersedia. Walaupun dari segi pembiayaan yang disalurkan terus meningkat, namun seiring berjalannya waktu inflasi akan menurunkan nilai mata uang yang menyebabkan daya konsumen masyarakat rendah.

Tingginya angka inflasi akan menyebabkan harga bahan pangan dan komoditas lainnya meningkat seiring dengan naiknya harga subsidi BBM²⁷. Dalam wilayah perindustrian seperti Banten dan DKI Jakarta kondisi seperti ini membuat aktivitas perekonomian masyarakat lebih terpusat pada pemenuhan kebutuhan pokok, seperti kebutuhan pangan dan sandang. Dengan demikian, masyarakat yang meminjam dana

²⁵ Luca Errico dan Mitra Farahbaksh, *Islamic banking: Issues in Prudential Regulations and Supervision*. (International Monetary Fund Working Paper, WP/98/30, 1998) hal. 6

²⁶ Nopirin, *Ekonomi Moneter*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1992, hal.25.

²⁷ Laporan Kebijakan Moneter Triwulan III 2013, hal. 5

(debitur) di bank umum syariah tentu akan mengalami kesulitan dalam membayar kewajibannya. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis yang dapat ditarik adalah

H₁ : Inflasi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Finance* provinsi industri (Banten dan DKI Jakarta) dan DI Yogyakarta.

2. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap *Non Performing Finance*

Produk domestik regional bruto digunakan untuk mengukur pendapatan total dalam perekonomian ataupun pengeluaran total barang dan jasa dalam perekonomian suatu daerah²⁸. Dengan kata lain, untuk melihat meningkat atau tidaknya perekonomian suatu daerah bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan produk domestik regional brutonya.

Produk domestik regional bruto pulau Jawa dari tahun 2010 sampai dengan 2015 mengindikasikan peningkatan perekonomian. Dengan keadaan perekonomian Indonesia membaik, daya beli masyarakat akan meningkat sehingga membuat keuntungan pada penjualan juga meningkat. Akibatnya para pengusaha mampu melunasi kewajibannya. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa

H₂ : Produk domestik regional bruto berpengaruh negatif terhadap *Non Performing Finance* di semua provinsi pulau Jawa

²⁸ Gregory Mankiw, Pengantar Ekonomi Makro: Edisi Asia, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hal. 18.

3. Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap *Non Performing Finance*

Indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia dari tahun 2010 hingga 2015 menunjukkan perbaikan. IPM merupakan gabungan dari nilai yang menunjukkan tingkat kemiskinan, kemampuan baca tulis, pendidikan, harapan hidup, dan faktor-faktor lainnya di sebuah negara atau wilayah administrative tertentu¹³. Terdapat tiga kriteria IPM, yaitu IPM tinggi dengan angka indeks di atas 0,800, IPM sedang dengan batas angka IPM 0,500 – 0,799, dan IPM rendah dengan nilai di bawah 0,500. Indeks ini dapat digunakan untuk membandingkan *human development* antara satu negara dengan negara lainnya ataupun membandingkan *human development* antara satu provinsi ataupun kota dengan provinsi ataupun lain di dalam satu wilayah negara. Angka IPM Indonesia dan kebanyakan provinsi di Indonesia pada saat ini masuk dalam kategori IPM sedang seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur.²⁹ Berbeda dengan wilayah Banten dan DKI Jakarta yang masuk dalam kategori IPM tinggi. Tingkat IPM sangat berpengaruh terhadap NPF karena IPM salah satu indikator pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi suatu daerah. Upah minimum provinsi merupakan indikator yang mengikuti indeks pembangunan manusia. Seperti wilayah Banten dan DKI Jakarta, 2 provinsi tersebut masuk dalam kategori IPM tinggi, dan angka UMP nya tinggi karena pertumbuhan ekonomi di kedua

²⁹ Badan Pusat Statistik

provinsi tersebut berkembang bagus. Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur masuk dalam kategori IPM sedang, maka dari itu angka UMP di empat provinsi tersebut dibawah UMP Banten dan DKI Jakarta. Dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis

H₃ : Indeks Pembangunan Manusia dan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif terhadap *Non Performing Finance* provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.